

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. **Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah.**  
<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/08/08/pengertian-kemandirian-keuangan-daerah/> (Diakses pada 07 Juni 2018).
- Afiah, N. N. **Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.** Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Albasiah, Oesi Agustina. “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011).” **Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 1, No. 2.** 2012.
- Ari. **Optimalisasi Pajak Daerah Dorong Kemandirian Keuangan Pemkab Pandeglang.** <https://tuntasmedia.com/2018/04/04/optimalisasi-pajak-daerah-dorong-kemandirian-keuangan-pemkab-pandeglang/> (Diakses pada 07 Juni 2018).
- Apriana, Dina, and Rudy Suryanto. “Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. **Jurnal Akuntansi dan Investasi 11, No. 1.** 2010, hal. 68-79.
- Ariani, K.R. dan Putri, G.A. “Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. **In Prosiding Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta.** 2016, hal. 364-369.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. **Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi 2014-2017.** Jakarta: 2017.
- Dewata, E., Ilmiyah, N.M. and Sarikadarwati, S. “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015”. **Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 5(1).** 2017, hal. .147-162.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. **Deskripsi dan Analisis APBN 2011.** Jakarta: 2011.
- Djaenuri, A. **Hubungan Keuangan Pusat-Daerah.** Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Eisenhardt, K.M. “Agency theory: An assessment and review”. **Academy of management review, 14(1).** 1989, hal. 57-74.
- Faud, R. **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.** Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

- Ghozali, Imam. **Aplkasi Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 8**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- \_\_\_\_\_. **Aplkasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Halim, A. **Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- \_\_\_\_\_. **Manajemen Keuangan Sektor Publik**. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Halim, Abdul, and Syukriy Abdullah. “Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah.” **Jurnal Akuntansi Pemerintah 2, No. 1**. 2010, hal. 53-64.
- Imawan, R. dan Wahyudin, A. “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012”. **Accounting Analysis Journal, 3(2)**. 2014.
- Jensen, M.C. dan Meckling, W.H. “Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”. **Journal of Financial Economics, 3(4)**. 1976, hal. 305-360.
- Kristiana, Ira. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhanperusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. **Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 1, No. 1**. 2012.
- Kusumawardani, M. “Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”. **Accounting Analysis Journal, 1(1)**. 2012, hal. 27-35.
- Lestari, Anita, Nasrullah Dali, and Muntu Abdullah. “Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja modal dan kemandirian keuangan Daerah provinsi sulawesi tenggara”. **Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP) 1, No. 2**. 2017, hal. 44-55.
- Marizka, Reza. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006–2011)”. **Jurnal Akuntansi UNP 1, No. 3**. 2013.
- Mardiasmo. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2002.
- Munir, D. **Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004.
- Mustami, Adinda Ade. **Sri Mulyani: Pemda masih ketergantungan pada APBN**. <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-pemda-masih-ketergantungan-pada-apbn> (Diakses pada 07 Juni 2018).

- Normalita, I.S. dan Mahmud, A. "Analysis of Capital Expenditure and Its Implications on Local Financial Independence". **Accounting Analysis Journal**, **6(2)**. 2017, hal. 219-228.
- Nurhemi, N. and Suryani, G. "Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". **Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan**, **18(2)**. 2015, hal.183-206.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sari, Putri Ika. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014)". **In Prosiding Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta**. 2015, hal. 537-545.
- Siregar, B. and Pratiwi, N. "The Effect Of Local Government Characteristics And Financial Independence On Economic Growth And Human Development Index In Indonesia". **Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan**, **19(2)**. 2017, hal. 65-71.
- Suadi. **Otonomi Daerah Gagal Wujudkan Kemandirian**. [http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/05/24/348276/otonomi\\_daerah\\_gagal\\_wujudkan\\_kemandirian/](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/05/24/348276/otonomi_daerah_gagal_wujudkan_kemandirian/) (Diakses pada 07 Juni 2018).
- Sugiyono. **Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)**. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suparmoko, M. **Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2002.
- Tahar, A. dan Zakhiya, M. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah". **Jurnal Akuntansi dan Investasi**, **12(1)**. 2016, hal. 88-99.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yani, A. **Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.** Depok: Rajagrafindo Persada, 2013.